

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WANAYASA
TAHUN 2024
(PENYELARASAN)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
BAB III	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	57
BAB V PENUTUP	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.976.835.704,-, dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

- 1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;**
- 2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.**

Dari 3 program, 7 kegiatan, dan 12 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 14 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.819.835.704,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.976.835.704,- Pada Perubahan Renja Perangkat

Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya kenaikan jabatan pada akhir tahun yang mengakibatkan naiknya penerimaan gaji dan tunjangan ASN, dan belum bisa direalisasikan di tahun 2022, sehingga menjadi beban hutang gaji.
2. Adanya kenaikan tarif iuran JKK dan JKM untuk THL, sementara untuk anggaran tidak bisa ditambah, sehingga dibayarkan di tahun 2023.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan

4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka perlu adanya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring yang baik dan mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi masing – masing Kasi dan Sub Bagian
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	85,50	85,11	82	87,31	106%	85,20	85,20	100%

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pelaporan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	
	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan	13 orang	14 orang	13 orang	13 orang	100%	13 orang	13 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 dokumen	50 dokumen	40 dokumen	49 dokumen	100%	50 dokumen	50dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	10 paket	100%

		disediakan								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin yang di sediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100 %	2 unit	2 unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang	Persentase Pemeliharaan			100%	100%	100%			

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	100%	100%				100%	100%	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	3 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	15 unit	7 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	15 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	85,50	85,11	82	87,31	106%	85,20	85,20	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

	Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Perijinan Non Usaha yang di Laksanakan.	162 dokumen	162 dokumen	0	0	0	162 dokumen	162 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dok	0	0	0	100%	4 dok	4 dok	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NILAI SAKIP	49,52	65,01	65,01		65,01	65,01	100%

		yang terlaksana								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 dokumen	17 dokumen	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	4 dokumen	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 dok	0 dok	0 dok	0 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

	dengan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	0	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	3 laporan	3 laporan	0	0	0	0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	NILAI SAKIP	49,52	65,01	65,01		65,01	65,01	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	10 dok	10 dok	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah belum maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Mengevaluasi, menelaah, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai IKM		-	85,20	85,50	85,75	86	85,11	87,31	85,20	85,75	
2.	Nilai SAKIP			65,01	68,00	69,00	70,01	51,86	49,52	65,01	68,00	
3.	Persentase pelunasan PBB							100%	100%			

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu urusan kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat
2. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
3. Masih Minimnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik.
4. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
5. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
7. Masih kurangnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
8. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan

yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat
2. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Terbatasnya sarana dan pra sarana yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
6. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
7. Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
8. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
9. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan

permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditandai oleh nilai skor SAKIP C.
2. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran. Wilayah Wanayasa termasuk salah satu kecamatan yang terdapat desa dengan angka kemiskinan ekstrem.
3. Sarana dan prasarana pendukung yang masih minim.
4. Rawan bencana alam tanah longsor.
5. Permasalahan stunting.
6. Kemiskinan ekstrim.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Wanayasa				2.719.000.000					2.719.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Wanayasa	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100%	2.400.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamata n Wanayasa	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100%	2.400.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	4.400.000	Perencanaa n, Penganggar an,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	4.400.000	
	Penyusunan		Jumlah	8 dokumen	2.200.000	Penyusunan		Jumlah	8	2.200.000	

	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.200.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.951.012.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.951.012.800	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.870.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.870.000.000	
	Pelaksanaan		Jumlah	12	77.000.000	Pelaksanaan		Jumlah	12	77.000.000	

	Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		n Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	4.012.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	4.012.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	102.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	99.000.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	11.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	11.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	91.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	88.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		75.187.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		75.187.200	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah unit mebel yang disediakan	1 unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan mesin yang di sediakan	1 unit	33.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan mesin yang di sediakan	2 unit	33.000.000	
	Pengadaan Aset tetap		Jumlah unit Aset tetap	1 unit	30.000.000	Pengadaan Aset tetap		Jumlah unit Aset tetap	2 unit	30.000.000	

	Lainnya		Lainnya yang disediakan			Lainnya		Lainnya yang disediakan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	4 unit	20.187.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	2 unit	20.187.200	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	22.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	22.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	82.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	75.187.200	
	Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan	12 laporan	19.800.000	Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan	12 laporan	19.800.000	

	Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	62.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	49.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana	100%	104.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana	100%	104.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	38.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	38.500.000	

	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.		yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya			an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.		yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	55.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	11.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	11.000.000	
	Program Penyelenggaraan		Persentase Penyelenggaraan	100%	130.000.000	Program Penyelenggaraan		Persentase Penyelenggaraan	100%	130.000.000	

	Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana			Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana			
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	20.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	20.000.000	
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 dokumen	20.000.000	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan		Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 dokumen	20.000.000	

			Pelayanan Umum			Prasarana Pelayanan Umum		Pelayanan Umum			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	110.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	110.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha		Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	162 dokumen	5.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha		Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	162 dokumen	5.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 laporan	16.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 laporan	16.500.000	

						Non Perijinan					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	88.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	88.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100%	16.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100%	16.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala		Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang	100%	16.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksana		Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang	100%	16.000.000	

	Daerah		terlaksana			an Tugas Kepala Daerah		terlaksana			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dok	16.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dok	16.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	173.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	173.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	173.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	173.000.000	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dokumen	11.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dokumen	11.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 dokumen	11.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 dokumen	11.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec pagentan	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka	2 dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan	kec pagentan	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka	2 dokumen	50.000.000	

			Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kepala Desa		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	11.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	11.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 dokumen	16.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 dokumen	16.500.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan	17 dokumen	26.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan	17 dokumen	26.000.000	

	Desa		Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Pemberdayaan Masyarakat Desa		Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 laporan	27.500.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 laporan	27.500.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2022
2. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2022
3. beberapa kegiatan yang belum terdanai sepenuhnya agar menjadi prioritas pendanaan dan penambahan pagu anggaran sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Wanayasa melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Wanayasa diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Wanayasa. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan tema pembangunan: "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan" adalah meliputi :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka RPD Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN. Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Wanayasa mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan

kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wanayasa sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Ketiga yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renstra yang mendukung RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan

Tujuan 6: Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Sasaran:

Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wanayasa beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	CC	65,01 (B)	68,00 (B)	69,00 (B)	70,01 (BB)
2	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	Survei Kepuasan masyarakat Kecamatan	85,11	85,20	85,50	85,75	86

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN WANAYASA KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		KECAMATAN WANAYASA						2.719.000.000,00							2.871.703.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.719.000.000,00							2.871.703.500,00	
	7.01	KECAMATAN						2.719.000.000,00							2.871.703.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	-			100 %	2.400.000.000,00						-	2.633.803.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			100 %	4.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Kecamatan Wanayasa	-	4.620.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Banjar Negara Wanayasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASISUMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Kecamatan Wanayasa		2.310.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil/Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	2.200.000,00	Kab. Banjar Negara Wanayasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASISUMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Kecamatan Wanayasa		2.310.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstras/ Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	1.951.012.800,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Kecamatan Wanayasa	-	2.048.563.500,00	KECAMATAN WANAYASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.870.000.000,00	Kab. Banyuwangi, Wanayasa, Semus KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		1.963.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	77.000.000,00	Kab. Banyuwangi, Wanayasa, Semus KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		80.850.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	4.012.800,00	Kab. Banyuwangi, Wanayasa, Semus KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		4.213.500,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	102.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa	-	107.730.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		11.550.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	91.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		96.180.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-			100 %	155.187.200,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa	-	176.750.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		52.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	33.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		34.650.000,00	KECAMATAN WANAYASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASISUMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		31.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.187.200,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASISUMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		35.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	22.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASISUMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		23.100.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			100 %	82.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa	-	86.415.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.800.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanasaba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanasaba		20.790.000,00	KECAMATAN WANAYASA
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	62.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanasaba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanasaba		65.625.000,00	KECAMATAN WANAYASA
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Daerah yang terlaksana	-			100 %	104.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanasaba	-	109.725.000,00	KECAMATAN WANAYASA
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Periznannya				9 Unit	38.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanasaba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanasaba		40.425.000,00	KECAMATAN WANAYASA
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	55.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanasaba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanasaba		57.750.000,00	KECAMATAN WANAYASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	11.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		11.550.000,00	KECAMATAN WANAYASA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana	-			100 %	138.600.000,00						-	138.600.000,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana	-			100 %	20.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa	-	21.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		21.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	-			100 %	110.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa	-	115.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				162 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		5.775.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonpertanian pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	16.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaborasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		17.325.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	88.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaborasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		92.400.000,00	KECAMATAN WANAYASA
3.	7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	-			100 %	18.800.000,00						-	18.800.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana	-			100 %	16.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaborasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa	-	16.800.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaborasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		16.800.000,00	KECAMATAN WANAYASA
4.	7.01.08	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	-			100 %	173.000.000,00						-	184.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas/ Rekomendasi/ dan Koordinasi/ Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	-			100 %	173.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa	-	184.600.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				17 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		21.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		11.550.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		11.550.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0006	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitas/ dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		52.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		14.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitas/ dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		17.325.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitas/ dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Wanayasa		27.300.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	27.500.000,00	Kab. Bajajpegaga, Wanayasa, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASISUMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	Kecamatan Wanayasa		28.875.000,00	KECAMATAN WANAYASA
J U M L A H								2.719.000.000,00							2.871.703.500,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan di Kecamatan Wanayasa sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
Terdiri dari 5 (lima) sub Kegiatan :
 - d.1. Pengadaan Mebel
 - d.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d.3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - d.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- d.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f.2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung
 - f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :
- a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
 - b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 - b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

- a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 8 (delapan) sub Kegiatan :
 - a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
 - a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - a.4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - a.5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - a.6. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 - a.7. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 - a.8. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2 Januari 2024


CAMAT WANAYASA,
SRI WAHJUNI, S.E
Perbina
NIP 19710217 200212 2 006